



---

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
TAHUN 2021**

---



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

# **B A B I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Penyusunan rancangan Rencana Kerja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil OPD sesuai Peraturan Gubernur nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu. Rencana pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dan dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang agar dapat disusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Tahap penyajian Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provsu Tahun Anggaran 2021 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan

daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2021, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selaras dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Seta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 30).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun

2021, Sedangkan tujuannya adalah menyusun program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara serta untuk mengetahui :

1. Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.
3. Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.
4. Target Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.
5. Pagu indikatif program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.
2. Mengevaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.
5. Sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

## **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) 2021 adalah sebagai berikut :

### **BAB. I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB. II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun N-2**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun N-2 dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

### **BAB. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan
- 3.4. Pagu Anggaran Untuk Program dan Kegiatan
- 3.5. Program dan Kegiatan Prioritas

### **BAB. IV. P e n u t u p**

## **B A B I I**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN N-2**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 dan Capaian Renstra PD**

Untuk menjaga konsistensi terhadap capaian target kinerja antara perencanaan dengan pelaksanaan dan untuk mengambil langkah-langkah penyempurnaan perlu dilakukan review terhadap Renja PD tahun 2019 yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana realisasi program dan kegiatan bila dibandingkan dengan Renstra dan prakiraan capaian kinerja pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) tahun berjalan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran terlebih dahulu perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan salah satu sarana untuk mengukur pengeluaran belanja dengan kinerja yang dihasilkan atau yang disebut dengan metode penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dan terukur dalam penyusunan anggaran yang dilakukan suatu organisasi sektor publik dengan menggunakan indikator kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun program kegiatan.

Sesuai dengan Laporan Realisasi Fisik, Keuangan dan Aset PD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provsu, terdapat Pagu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp. 101.880.998.558,81 dengan realisasi sebesar Rp. 82.686.732.991,00 atau 81,16 %.

1. Belanja Tidak Langsung pagu sebesar Rp. 21.039.971.793,81 dan realisasi sebesar Rp. 18.505.366.397,00 atau 87,95%
2. Belanja Langsung pagu sebesar Rp. 80.841.026.765,00 dan realisasi sebesar Rp. 64.180.666.594,00 atau 79,39%.

**Rincian Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.2**

**Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

<b>URAIAN</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSEN</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG</b>	<b>101.880.998.558,81</b>	<b>82.686.732.991,00</b>	<b>81,16%</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>21.039.971.793,81</b>	<b>18.505.366.397,00</b>	<b>87,95%</b>
Belanja Pegawai	21.039.971.793,81	18.505.366.397,00	87,95%
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>80.841.026.765,00</b>	<b>64.180.666.594,00</b>	<b>79,39%</b>
<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSEN</b>
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>5.421.836.621</b>	<b>4.210.388.608</b>	<b>77,66%</b>
Penyediaan jasa surat menyurat	84.425.000	5.400.000	6,40%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	81.000.000	16.145.550	19,93%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	169.200.000	140.017.000	82,75%
Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	200.000.000	52.610.123	26,31%
Penyediaan jasa administrasi perkantoran/keuangan	1.875.860.000	1.361.330.000	72,57%
Penyediaan alat tulis kantor	237.551.591	237.345.140	99,91%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.044.500	194.500.000	64,82%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	51.926.870	16.475.000	31,73%
Penyediaan makanan dan minuman	547.155.000	380.817.600	69,60%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.679.673.660	1.675.748.195	99,77%
Penyediaan jasa kebersihan	97.500.000	32.500.000	33,33%
Penyediaan jasa keamanan	97.500.000	97.500.000	100,00%
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>33.092.334.750</b>	<b>32.003.401.617</b>	<b>96,71%</b>
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	599.804.750	378.980.676	63,18%
Pengadaan Lahan Untuk Islamic Center	32.492.530.000	31.624.420.941	97,33%

<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>206.425.000</b>	<b>87.806.000</b>	<b>42,54%</b>
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian BPKAD	206.425.000	87.806.000	42,54%
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>2.308.866.637</b>	<b>1.541.686.693</b>	<b>66,77%</b>
Bimbingan Teknis Sistem Online Penerimaan Daerah	146.897.334	121.599.000	82,78%
Sosialisasi Pajak PPN dan PPh Pasal 22, 23, Final Pasal 4 Ayat 2	134.647.334	122.389.000	90,90%
Sosialisasi Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah Tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Daerah Terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah	133.897.334	123.349.000	92,12%
Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD	221.842.550	195.607.918	88,17%
Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akruai di Lingkungan Pemprov	260.353.110	87.971.800	33,79%
Sosialisasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Sesuai SAP Berbasis Akruai	1.257.143.975	843.819.975	67,12%
Pendidikan dan Pelatihan Formal	154.085.000	46.950.000	30,47%
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>3.947.029.434</b>	<b>2.612.081.012</b>	<b>66,18%</b>
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja	16.376.500	-	0,00%
Penyusunan Anggaran Kas Pemprov APBD dan Perubahan APBD	30.775.552	-	0,00%
Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	292.853.752	273.566.395	93,41%
Pengelolaan Pajak PPN dan PPh	259.877.212	237.822.109	91,51%
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan Dan Semesteran	315.672.230	176.700.000	55,98%
Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	190.666.000	175.210.000	91,89%
Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemprov	160.000.000	144.661.160	90,41%
Rekonsiliasi Laporan Fungsional Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	99.766.180	65.000.000	65,15%
In House Training Pengelolaan Keuangan Daerah	281.584.810	119.226.600	42,34%

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1.448.180.800	1.079.145.119	74,52%
Penatausahaan Belanja Bagi Hasil, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan	497.472.916	242.005.073	48,65%
Penyusunan Renja Dan Renja Perubahan BPKAD	22.562.302	-	0,00%
Penyusunan Renstra BPKAD	37.326.150	-	0,00%
Penyusunan RKA Dan RKA Perubahan BPKAD	11.776.010	-	0,00%
Penyusunan DPA dan DPPA BPKAD	29.272.020	9.012.500	30,79%
Penyusunan Pelaporan Keuangan BPKAD	139.739.000	81.362.056	58,22%
Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada BPKAD	68.128.000	-	0,00%
Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan Pada BPKAD	45.000.000	8.370.000	18,60%
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>4.457.555.207</b>	<b>3.493.754.266</b>	<b>78,38%</b>
Penyusunan Penggolongan Dan Kodefikasi BMD Terkait Penyusunan Standar Harga Barang	321.265.981	264.637.672	82,37%
Evaluasi Dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD), Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)	476.778.820	373.906.834	78,42%
Penyusunan Buku Realisasi Pengadaan Barang Belanja Langsung	99.310.010	90.283.260	90,91%
Penetapan dan Pengalihan Status BMD	157.221.946	70.410.946	44,78%
Pengelolaan Aset dan Barang Persediaan Menggunakan Aplikasi SIMDA BMD	1.279.103.240	1.098.134.175	85,85%
Pemutakhiran Data Aset Tetap Milik Pemprovsu Untuk Bahan Neraca Per 31 Desember 2018	168.699.900	132.544.890	78,57%
Monitoring Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan Sumatera Utara	185.559.310	149.124.310	80,36%
Penaksiran/Penilaian Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara	318.700.000	197.078.500	61,84%
Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provusu	478.972.120	360.216.994	75,21%

Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Tidak Bergerak Milik Pemprov	186.503.410	176.178.150	94,46%
Pengurusan dan Pembaharuan Sertifikasi Tanah Milik Pemprov	393.614.070	304.498.810	77,36%
Monitoring dan Evaluasi Hasil Inventarisasi Pasca Sensus Barang Milik Daerah	157.448.000	143.673.500	91,25%
Penyusunan Laporan Tahunan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	81.504.120	24.213.795	29,71%
Analisis Pemakaian/Penggunaan Rumah Dinas Daerah	152.874.280	108.852.430	71,20%
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>31.406.979.116</b>	<b>20.275.248.398</b>	<b>64,56%</b>
Tim Pembinaan Gaji PNS Daerah Pada SKPD di Lingkungan Pemprov	155.394.812	150.706.552	96,98%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Sistem Cash Management System	124.976.000	122.179.900	97,76%
Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	923.670.614	622.502.376	67,39%
Pengelolaan Aplikasi Terintegrasi Cash Management System (CMS) Dalam Penatausahaan Keuangan	198.330.000	177.500.000	89,50%
Monitoring dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	428.445.000	346.211.400	80,81%
Penyusunan Dan Rekapitulasi Data APBD Kabupaten/Kota	394.275.450	383.238.598	97,20%
Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	514.199.310	436.698.200	84,93%
Pembinaan Dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan Di Kabupaten/Kota	170.930.000	78.128.670	45,71%
Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	459.163.020	286.277.504	62,35%
Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara	6.378.007.810	2.643.205.011	41,44%
Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara	6.203.238.310	2.448.508.503	39,47%
Penyusunan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara	2.369.208.620	2.026.332.836	85,53%
Penyusunan KUA Dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara	2.121.668.620	1.820.719.620	85,82%

Verifikasi DPA/DPPA/DPAL SKPD Pemprov	2.346.800.000	2.142.016.000	91,27%
Verifikasi RKA/RKA Perubahan SKPD Pemprov	2.287.280.000	1.641.000.000	71,74%
Pengelolaan Aplikasi E-Kuangan	2.323.827.000	2.015.207.121	86,72%
Rekonsiliasi Data Belanja Dana Bagi Hasil Provinsi kepada Kab/Kota	423.403.100	417.337.028	98,57%
Koordinasi dan Pelaporan Dana Transfer Provinsi Sumatera Utara	1.202.099.750	1.025.031.079	85,27%
Penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Perubahan Penjabaran APBD	1.766.840.400	966.158.000	54,68%
Pengelolaan Informasi Media Sosial Dan SMS Pengaduan BPKAD	81.810.620	32.500.000	39,73%
Penyimpanan Penataan Dan Pengarsipan Berkas BPKAD	363.155.180	327.650.000	90,22%
Pengelolaan Dokumentasi Dan Konten Website BPKAD	170.255.500	122.440.000	71,92%
<b>JUMLAH</b>	<b>80.841.026.765</b>	<b>64.180.666.594</b>	<b>79,39%</b>

Adapun kegiatan yang tidak terealisasi anggaran belanjanya antara lain :

- 1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja.** Kegiatan ini terlaksana 100% dengan menggunakan anggaran belanja rutin untuk penggandaan Lapran Kinerja (LK) Tahun 2018.
- 2. Penyusunan Anggaran Kas Pemprov APBD dan Perubahan APBD.** Pada pelaksanaan kegiatan mencapai 100% namun tidak menggunakan anggaran yang telah disediakan.
- 3. Penyusunan Renja Dan Renja Perubahan BPKAD.** Untuk kegiatan penyusunan Renja dan Perubahan Renja BPKAD mencapai 100% tetapi tidak menggunakan anggaran yang tersedia.
- 4. Penyusunan Renstra BPKAD.** BPKAD telah menyusun Renstra dengan capaian kinerja 100% namun tidak menggunakan anggaran yang telah dianggarkan.
- 5. Penyusunan RKA Dan RKA Perubahan BPKAD.** Kegiatan ini capaian kinerja mencapai 100% namun tidak menggunakan anggaran.

6. **Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada BPKAD.** Untuk kegiatan ini BPKAD tidak menggunakan anggaran namun capaian kinerja mencapai 100%.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan PD. Selain itu melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah diukur berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang

dilaksanakan harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tersebut diatas.

Capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu antara lain:

1. Pada pengelolaan pendapatan daerah telah digunakan aplikasi Penerimaan Online yang terdapat pada menu aplikasi E-Keuangan dan terintegrasi dengan aplikasi pada PT. Bank Sumut sehingga setiap setoran dapat diketahui jenis dan jumlah penerimaan daerah dan dapat diketahui jumlah seluruh pendapatan daerah pada setiap saat atau secara real time.
2. Untuk pengelolaan belanja daerah telah digunakan aplikasi E-Keuangan yang dimulai dengan penganggaran, penggunaan dan laporan belanja daerah sehingga tercipta penatausahaan yang baik.
3. Pada pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/Aset telah menggunakan aplikasi Simbada Online. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan PD sehingga data Barang Milik Daerah (BMD)/ Aset Provinsi Sumatera Utara dapat diperoleh secara akurat.

Hambatan utama pada penyelenggaraan pelayanan antara lain:

1. Kurangnya sumberdaya manusia (ASN) untuk menggunakan aplikasi sehingga masih mengguna tenaga operator dari luar.
2. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga masih terdapat hambatan untuk Melaksanakan kegiatan-kegiatan.

Adapun Capaian Kinerja yang dicapai sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain yaitu :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	CAPAIAN 2019	
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1.	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD	Bidang Pengelolaan Anggaran	Tersusun 2 Dokumen KUA dan PPAS APBD dan 2 Dokumen Perubahan APBD
		2.	Jumlah Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	Jumlah Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	Bidang Pengelolaan Anggaran	Diverifikasi 50 Dokumen RKA dan 50 Dokumen Perubahan RKA
		3.	Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Bidang Pengelolaan Anggaran	Tersusun 1 Dokumen APBD dan 1 Dokumen Perubahan APBD
		4.	Jumlah Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD yang di Verifikasi	Jumlah Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD yang di Verifikasi	Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD	Bidang Pengelolaan Anggaran	Diverifikasi 50 Dokumen DPA dan 50 Dokumen Perubahan DPA
		5.	Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar	$\frac{\text{(Jumlah SP2D Tepat Waktu)}}{\text{(Jumlah SP2D)}} \times 100\%$	Rekapitulasi SP2D	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	98% SP2D Tepat Waktu dan terealisasi

		6.	Persentase SKPD dengan realisasi belanja di atas 95%	$\frac{(\text{Jumlah PD realisasi belanja diatas 95\%})}{(\text{Jumlah PD})} \times 100\%$	Laporan Rekapitulasi Realisasi Belanja SKPD	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	18 % PD dengan realisasi belanja 95% ke atas
		7.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Pertanggungjawaban SKPD	Bidang Akuntansi	1 Dokumen Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018
		8.	Jumlah Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD SKPD	Bidang Akuntansi	1 Laporan Semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	9.	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat	$\frac{(\text{Jumlah Tanah yang bersertifikat})}{(\text{Jumlah seluruh tanah})} \times 100\%$	Laporan Barang Milik Daerah	Bidang Aset	1,4 % Luas Tanah yang telah disertifikat
		10.	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Laporan Barang Milik Daerah yang disusun dalam rangka penyusunan neraca	Berita Acara Rekonsiliasi	Bidang Aset	1 laporan Neraca BMD per 31 Desember 2018
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kab/kota	11.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD yang dievaluasi tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang APBD yang dievaluasi Tepat waktu paling lambat 15 hari kerja})}{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang APBD yang dievaluasi})} \times 100\%$	Draf Ranperda/Ranperkada Kab/Kota tentang APBD	Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100% SK Gubsu tentang APBD Kab/Kota yang di evaluasi
		12.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang P.APBD yang dievaluasi Tepat waktu paling lambat 15 hari kerja})}{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang P.APBD yang dievaluasi})} \times 100\%$	Draf Ranperda/Ranperkada Kab/Kota tentang Perubahan APBD	Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100% SK Gubsu tentang Perubahan APBD Kab/Kota yang di evaluasi
		13.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi Tepat waktu paling lambat 15 hari kerja})}{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi})} \times 100\%$	Draf Ranperda/Ranperkada Kab/Kota tentang Pertanggungjawaban APBD	Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100% SK Gubsu tentang Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang di evaluasi

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pada umumnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat terlaksana dengan baik. Adapun kendala-kendala untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagian besar karena waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi, Perubahan Nomenklatur dan efisiensi pagu Anggaran Kegiatan Badan pada APBD Tahun Anggaran berjalan. Mekanisme pelaksanaannya adalah untuk disesuaikan dengan proyeksi belanja yang diprediksi tidak tercapai.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi atas tidak terlaksananya beberapa kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik atas setiap kegiatan. Begitu juga dengan koordinasi antar bidang lebih ditingkatkan. Selain itu, perlu juga diadakan pelatihan / bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung kelancaran kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu. Koordinasi antar instansi/Perangkat Daerah (PD) dan Pemerintah Kabupaten / Kota baik dalam hal pengumpulan data dan lainnya, untuk lebih ditingkatkan.

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Renja Perangkat Daerah Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di sesuaikan dengan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun berjalan. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Catatan tersebut antara lain terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

## **B A B   I I I**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provsu mempunyai kaitan yang erat dimana tugas pokok dan fungsi harus mendukung Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional diantaranya adalah :

<b>Agenda Pembangunan</b>	<b>Prioritas Pembangunan</b>
Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.	1. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2. Meningkatkan Partisipasi Publik
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	1. Mencegah dan memberantas korupsi
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	2. Penguatan sektor keuangan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada Pembangunan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintah serta meningkatkan Partisipasi Publik. Perlunya Akuntabilitas guna untuk mencegah dan memberantas korupsi. Kegiatan keuangan Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah dapat menjadi penguatan sektor keuangan.

Hal tersebut diatas menunjukkan adanya keterkaitan antara Prioritas pembangunan Nasional dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan Rencana Kerja-BPKAD yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain :

- a. Memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, program dan kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang ;
- c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi serta sinergitas antar SKPD, Pemerintahan Daerah maupun Pemerintah Pusat ;
- d. Meningkatkan komunikasi dan pengembangan data serta sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
- e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembiayaan yang didanai dari DAU, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Sasaran, adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi, yaitu :

- a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program kegiatan dan pengelolaan APBD ;

- b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipatif, responsibilitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
- c. Meningkatnya jumlah dan jenis sumber-sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara maka Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, Program dan Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi dan Perkantoran , yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan administrasi. Sasaran program ini adalah peningkatan pelayanan administrasi. Program ini terdiri dari 26 kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung peningkatan kinerja. Sasaran program ini adalah peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur. Program ini terdiri dari 2 kegiatan.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Sasaran program ini adalah peningkatan kapasitas ketaatan aparatur di bidang keuangan daerah. Program ini terdiri dari 3 kegiatan.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemda di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sasaran program ini adalah terbitnya peraturan-peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah, meningkatnya waktu capaian atas siklus-siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan hingga pelaporan serta meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemda. Program ini terdiri dari 7 kegiatan.

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan berkualitas yang bersih dan berwibawa. Sasaran program ini adalah penatausahaan. Program ini terdiri dari 13 kegiatan.
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran tugas pokok dan fungsi lembaga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sasaran program ini adalah kapasitas lembaga. Program ini terdiri dari 25 kegiatan.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

#### **I. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu merupakan salah satu Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Asisten Administrasi Umum dan Aset.

Tugas Pokok Badan adalah berkaitan dengan Keuangan dan Aset yaitu :

“Merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah.”

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu menyelenggarakan fungsi :

- a. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang perbendaharaan dan kas daerah, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset;

- b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **II. Jumlah Program dan Kegiatan**

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu Tahun Anggaran 2021 menganggarkan anggaran untuk program dan kegiatan yaitu:

### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Alat Tulis Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
12. Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor
13. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15. Penyediaan Makanan dan Minumam
16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar daerah
17. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
18. Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD

19. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
20. Penyimpanan Penataan dan Pengarsipan Berkas
21. Pengelolaan Dokumentasi dan Konten Website BPKAD
22. Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah se-Sumut

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Penyediaan Jasa Sewa Gedung Sementara BPKAD
2. Pengadaan Mebeleur

**c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian BPKAD
2. Pendidikan dan pelatihan Formal

**d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
2. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
4. Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
5. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
6. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
7. Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

**e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

1. Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan jenis dan tipe barang
2. Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
3. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
4. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah

5. Penatausahaan Barang Milik Daerah
6. Inventarisasi Barang Milik Daerah
7. Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
8. Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
9. Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
10. Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
11. Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi Dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah
12. Konsolidasi Penyusunan laporan Barang Milik Daerah dari SKPD
13. Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

**f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembangan Pemerintah Daerah**

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
3. Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
4. Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D
5. Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, serta Penerbitan SKPP
6. Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
7. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
8. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
9. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)

10. Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
11. Penyusunan KUA dan PPAS
12. Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
13. Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD
14. Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD
15. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
16. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
17. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
18. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
19. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
20. Manajemen Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
22. Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota
23. Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
24. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
25. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan

### **3.4 Pagu Anggaran Untuk Program dan Kegiatan**

Untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dialokasikan anggaran dana yang tertuang dalam APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021. Adapun Pagu Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai pada **Lampiran 3.1.**

### 3.5 Program Dan Kegiatan Prioritas

Adapun anggaran program dan kegiatan prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah seperti tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	ANGGARAN	
1	2		3	4	5	
1.	1.	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun	4	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.088.106.000</b>	
				1.	Penyusunan KUA dan PPAS	567.303.000
				2.	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	520803000
	2.	Jumlah Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	100	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>599.200.000</b>	
				1.	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	599.200.000
	3.	Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	2	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>5.220.053.600</b>	
				1.	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.977.267.800
				2.	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.242.785.800
	4.	Jumlah Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD yang di Verifikasi	100	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.947.750.000</b>	
				1.	Penyusunan dan Rview DPA SKPD/ Perubahan DPA SKPD	2.947.750.000
5.	Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar	100	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>124.976.000</b>		
			1.	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji serta Penerbitan SKPP	545.144.000	

	6.	Persentase SKPD dengan realisasi belanja di atas 95%	95		<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>212.144.000</b>	
				1.	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	212.144.000	
	7.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	1		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>1.198.012.000</b>	
				1.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	691.946.000	
				2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi	506.066.000	
	8.	Jumlah Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	6		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>315.672.230</b>	
				1.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda	214.670.000	
	2.	9.	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat	10		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>4.021.575.700</b>
				1.	Koordinasi dan Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	4.021.575.700	
		10.	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	5		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>1.856.487.276</b>
			1.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	400.026.000		
			2.	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	454.827.000		
			3.	Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	468.591.000		
			4.	Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	381.114.000		

				5.	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi Dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	277.844.000
3.	11.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD dan Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu	66		<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.346.465.000</b>
				1.	Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	881.552.500
				2.	Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota	464.912.500
	12.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	33		<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>597.058.000</b>
					Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	597.058.000

## **B A B   I V**

### **P E N U T U P**

Keberhasilan pelaksanaan Rencana kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sangat tergantung kepada kerjasama dan dukungan serta komitmen dan kemauan yang kuat dari seluruh komponen, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada pelaksanaan penggunaan anggaran kegiatan perlu dievaluasi antara penganggaran anggaran kegiatan dan realisasi hasil anggaran untuk mencapai output yang dipergunakan sehingga dapat dinilai keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan.

Kiranya rencana kerja ini dapat menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyusun anggaran, program dan kegiatan dan menjadi standar dalam pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.

Medan,

**PIt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730824 199203 1 001**



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2021					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEG	HASIL KEG				
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>											
5	Keuangan								38.000.000.000			38.000.000.000
5	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>								12.198.985.459			12.198.985.459
5	<b>Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								224.450.000			224.450.000
5	02 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja oleh BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	1 dokumen	1 OPD	86.450.000	PAD	1 dokumen	86.450.000
5	02 01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah RKA yang disusun	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja oleh BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	1 dokumen	1 OPD	23.000.000	PAD	1 dokumen	23.000.000
5	02 01 1.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Perubahan RKA yang disusun	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja oleh BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	1 dokumen	1 OPD	23.000.000	PAD	1 dokumen	23.000.000
5	02 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah DPA yang disusun	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja oleh BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	1 dokumen	1 OPD	23.000.000	PAD	1 dokumen	23.000.000
5	02 01 1.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Perubahan DPA yang disusun	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja oleh BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	1 dokumen	1 OPD	23.000.000	PAD	1 dokumen	23.000.000
5	02 01 1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja oleh BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	1 dokumen	1 OPD	23.000.000	PAD	1 dokumen	23.000.000
5	02 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Evaluasi Yang Dihilangkan	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja oleh BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	1 dokumen	1 OPD	23.000.000	PAD	1 dokumen	23.000.000
5	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								1.460.612.000			1.460.612.000
5	02 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah administrasi yang tersedia	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	50 item	1 OPD	13.956.000	PAD	50 item	13.956.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
										PROGRAM	KELUARAN SUB KEG	HASIL KEG				
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah bukti pengeluaran yang diverifikasi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	150 dokumen	1 OPD	1.196.280.000	PAD	150 dokumen	1.196.280.000
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	12 kali	1 OPD	23.000.000	PAD	12 kali	23.000.000
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	1 dokumen	1 OPD	23.000.000	PAD	1 dokumen	23.000.000
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang disusun	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	1 dokumen	1 OPD	23.000.000	PAD	1 dokumen	23.000.000
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	1 dokumen	1 OPD	161.076.000	PAD	1 dokumen	161.076.000
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Medan, Sumatera Utara	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan prognosis realisasi Medan, Sumatera Utara yang dihasilkan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	1 dokumen	1 OPD	20.300.000	PAD	1 dokumen	20.300.000
5	02	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								<b>190.400.000</b>			<b>190.400.000</b>
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Laporan penatausahaan BMD yang dihasilkan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	1 dokumen	1 OPD	190.400.000	PAD	1 dokumen	190.400.000
5	02	01	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>481.736.000</b>			<b>481.736.000</b>
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diolah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	117 orang	1 OPD	194.200.000	PAD	117 orang	194.200.000
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	117 orang	1 OPD	287.536.000	PAD	117 orang	287.536.000
5	02	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>4.224.668.359</b>			<b>4.224.668.359</b>
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	50 buah	1 OPD	115.214.000	PAD	50 buah	115.214.000
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibeli	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	40 buah	1 OPD	743.381.376	PAD	40 buah	743.381.376
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	50 buah	1 OPD	261.985.600	PAD	50 buah	261.985.600
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah bahan logistik yang disediakan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	117 orang	1 OPD	728.133.000	PAD	117 orang	728.133.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
										PROGRAM	KELUARAN SUB KEG	HASIL KEG				
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	50 item	1 OPD	300.056.000	PAD	50 item	300.056.000
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	20 item	1 OPD	79.760.000	PAD	20 item	79.760.000
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	300 tamu	1 OPD	68.000.000	PAD	300 tamu	68.000.000
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi yang dilakukan dalam dan luar daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	100 kali	1 OPD	1.443.638.383	PAD	100 kali	1.443.638.383
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah arsip dinamis yang ditatausahakan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	100 dokumen	1 OPD	35.500.000	PAD	100 dokumen	35.500.000
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah sarana/fasilitas yang disediakan untuk SPBE	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	20 buah	1 OPD	449.000.000	PAD	20 buah	449.000.000
5	02	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>623.770.000</b>			<b>623.770.000</b>	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah mebel yang dibeli	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%		1 OPD	623.770.000	PAD		623.770.000
5	02	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>4.149.261.600</b>			<b>4.149.261.600</b>	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah surat, dokumen dan paket yang dikirim atau dikelola	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	3200 buah	1 OPD	150.000.000	PAD	3200 buah	150.000.000
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Rekening jasa sumber daya yang dibayarkan setiap bulan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	3 jenis	1 OPD	894.061.600	PAD	3 jenis	894.061.600
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	150 unit	1 OPD	300.000.000	PAD	150 unit	300.000.000
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jenis dan jumlah pelayanan umum kantor yang dibayar setiap bulan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	5 jenis	1 OPD	2.805.200.000	PAD	5 jenis	2.805.200.000
5	02	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>844.087.500</b>			<b>844.087.500</b>	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jenis dan jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	7 unit	1 OPD	277.995.000	PAD	7 unit	277.995.000
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	17 unit	1 OPD	367.550.000	PAD	17 unit	367.550.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
										PROGRAM	KELUARAN SUB KEG	HASIL KEG				
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah dan luas gedung kantor dan bangunan yang dipelihara/rehab	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Medan, Sumatera Utara	100%	1 unit	1 OPD	198.542.500	PAD	1 unit	198.542.500
5	02	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>								<b>17.810.641.450</b>			<b>17.810.641.450</b>
5	02	02	1.01		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>								<b>8.748.813.350</b>			<b>8.748.813.350</b>
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	2 Dokumen	49 OPD	818.954.000	PAD	2 Dokumen	818.954.000
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun tepat waktu	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	2 Dokumen	49 OPD	787.261.500	PAD	2 Dokumen	787.261.500
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Berita Acara Review RKA-SKPD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	39 Dokumen	49 OPD	334.394.000	PAD	39 Dokumen	334.394.000
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Berita Acara Review Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	39 Dokumen	49 OPD	639.428.400	PAD	39 Dokumen	639.428.400
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Berita Acara Review DPA-SKPD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	39 Dokumen	49 OPD	140.797.700	PAD	39 Dokumen	140.797.700
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Berita Acara Review Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	39 Dokumen	49 OPD	355.219.700	PAD	39 Dokumen	355.219.700
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang APBD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	8 Dokumen	49 OPD	2.154.241.000	PAD	8 Dokumen	2.154.241.000
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	9 Dokumen	49 OPD	2.980.111.300	PAD	9 Dokumen	2.980.111.300
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Medan, Sumatera Utara Pendapatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	1 Dokumen	49 OPD	175.437.500	PAD	1 Dokumen	175.437.500

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
										PROGRAM	KELUARAN SUB KEG	HASIL KEG				
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Medan, Sumatera Utara Belanja Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	1 Dokumen	49 OPD	179.094.625	PAD	1 Dokumen	179.094.625
5	02	02	1.01	12	Koordinasi Perencanaan Medan, Sumatera Utara Pembiayaan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	1 Dokumen	49 OPD	183.873.625	PAD	1 Dokumen	183.873.625
5	02	02	1.02		<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					100%			<b>2.299.928.700</b>		<b>2.299.928.700</b>	
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang APBD kab/kota	Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	33 dokumen	33 Kab/Kota	802.445.700	PAD	33 dokumen	802.445.700
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang Perubahan APBD kab/kota	Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	33 dokumen	33 Kab/Kota	457.137.500	PAD	33 dokumen	457.137.500
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota	Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	33 dokumen	33 Kab/Kota	545.297.000	PAD	33 dokumen	545.297.000
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah asistensi yang dilakukan pada setiap kab/kota se-Sumut	Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	33 kab/kota	33 Kab/Kota	102.170.000	PAD	33 kab/kota	102.170.000
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah ASN yang menghadiri sosialisasi	Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	100 org	33 Kab/Kota	392.878.500	PAD	100 org	392.878.500
5	02	02	1.03		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>					100%			<b>2.239.164.000</b>		<b>2.239.164.000</b>	
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pemahaman SDM terhadap penggunaan aplikasi	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	49 OPD	49 OPD	108.300.000	PAD	49 OPD	108.300.000
5	02	02	1.03	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya penatausahaan pembiayaan daerah	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	6 BUMD	49 OPD	54.400.000	PAD	6 BUMD	54.400.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
										PROGRAM	KELUARAN SUB KEG	HASIL KEG				
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya laporan dana perimbangan dan dana transfer	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	12 Dokumen	49 OPD	266.000.000	PAD	12 Dokumen	266.000.000
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas, terlaksananya rekonsiliasi penyetoran pajak pusat ke RKUN	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	14 Dokumen	49 OPD	611.984.000	PAD	14 Dokumen	611.984.000
5	02	02	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya analisis piutang dan utang Pemprov	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	1 Dokumen	49 OPD	54.900.000	PAD	1 Dokumen	54.900.000
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah BA Rekonsiliasi dengan instansi terkait	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	1 Dokumen	49 OPD	755.380.000	PAD	1 Dokumen	755.380.000
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya regulasi atas pengelolaan keuangan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	4 Dokumen	49 OPD	388.200.000	PAD	4 Dokumen	388.200.000
5	02	02	1.04		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>											
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya rekonsiliasi dan verifikasi	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	12 Dokumen	49 OPD	153.663.950	PAD	12 Dokumen	153.663.950
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	2 Dokumen	49 OPD	720.050.000	PAD	2 Dokumen	720.050.000
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas LKPD sesuai dengan SAP	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	1 Dokumen	49 OPD	742.913.500	PAD	1 Dokumen	742.913.500
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan pergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	2 Dokumen	49 OPD	430.684.000	PAD	2 Dokumen	430.684.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
										PROGRAM	KELUARAN SUB KEG	HASIL KEG				
5	02	02	1.04	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya dokumen analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	1 Dokumen	49 OPD	171.324.000	PAD	1 Dokumen	171.324.000
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya SOP	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	1 Dokumen	49 OPD	242.928.000	PAD	1 Dokumen	242.928.000
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah partisipan yang hadir	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	100 Orang	49 OPD	290.464.750	PAD	100 Orang	290.464.750
5	02	02	1.06		<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>											<b>1.770.707.200</b>
5	02	02	1.06	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Laporan pengelolaan data APBD dengan aplikasi SIPD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola data keuangan daerah dengan SIPD	Medan, Sumatera Utara	100%	1 Dokumen	49 OPD	1.770.707.200	PAD	1 Dokumen	1.770.707.200
5	02	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>											<b>7.990.373.091</b>
5	02	03			<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>											<b>7.990.373.091</b>
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen standar harga yang dihasilkan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	1 Dokumen	49 OPD	400.062.660	PAD	1 Dokumen	400.062.660
5	02	03	1.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen standar BMD dan standar kebutuhan BMD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	2 Dokumen	49 OPD	399.964.690	PAD	2 Dokumen	399.964.690
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	49 dokumen	49 OPD	318.508.570	PAD	49 dokumen	318.508.570
5	02	03	1.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah pergub tentang pengelolaan BMD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	1 dokumen	49 OPD	246.940.610	PAD	1 dokumen	246.940.610
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah OPD yang melakukan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	49 OPD	49 OPD	1.076.169.161	PAD	49 OPD	1.076.169.161

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
						PROGRAM	KELUARAN SUB KEG	HASIL KEG				
5 02 03 1.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah OPD yang melakukan inventarisasi BMD sesuai ketentuan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	49 OPD	49 OPD	338.813.000	PAD	49 OPD	338.813.000
5 02 03 1.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah BMD yang mendapatkan perlindungan keamanan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	49 OPD	49 OPD	2.681.887.700	PAD	49 OPD	2.681.887.700
5 02 03 1.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah BMD yang mendapatkan penilaian	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	490 OPD	49 OPD	609.758.260	PAD	490 OPD	609.758.260
5 02 03 1.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah OPD Pemprov yang mematuhi Permendagri No 108 Tahun 2016	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	49 OPD	49 OPD	258.783.000	PAD	49 OPD	258.783.000
5 02 03 1.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah SK BMD Yang Dioptimalisasikan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	48 SK	49 OPD	1.028.311.940	PAD	48 SK	1.028.311.940
5 02 03 1.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah BA rekonsiliasi BMD yang dihasilkan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	49 dokumen	49 OPD	279.597.000	PAD	49 dokumen	279.597.000
5 02 03 1.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah laporan BMD OPD Pemprov	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	49 dokumen	49 OPD	173.572.000	PAD	49 dokumen	173.572.000
5 02 03 1.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah kabupaten/kota yang menerima pembinaan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Medan, Sumatera Utara	100%	33 kab/kota	49 OPD	178.004.500	PAD	33 kab/kota	178.004.500